

REFLEKSI KINERJA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKOWI SELAMA TIGA TAHUN PADA PERIODE KEDUA PEMERINTAHAN

Cornelia Evelin Cabui
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo, Serang, Banten
email: dosen10082@unpam.ac.id

Paper Accepted: 25 Maret 2022
Paper Reviewed: 02-09 April 2022
Paper Edited: 10-20 April 2022
Paper Approved: 24 April 2022

ABSTRAK

Presiden Jokowi kini sedang menjalani masa jabatan kedua sebagai presiden Indonesia. Namun, perjalanan periode keduanya tidak berjalan mulus. COVID-19 telah menyerbu Indonesia sejak Maret 2020. Berbagai pernyataan terkait COVID-19 seolah menjadi bahan tertawaan yang menimbulkan kontroversi. Selanjutnya, berbagai pernyataan pemerintah mengenai berbagai isu publik, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, menimbulkan gesekan yang berujung pada konflik. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Dengan Kinerja yang baik dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Artikel ini menggunakan metode studi Literatur dan observasi dengan analisis kualitatif kinerja pemerintahan presiden Jokowi menurun yang berujung pada kepuasan masyarakat. Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet karena Kebutuhan reshuffle kabinet sangat mendesak terutama pada kementerian terkait harga kebutuhan pokok dan energi sebagai masalah mendesak yang perlu diselesaikan.

Kata kunci: Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam Pilpres 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatannya yang kedua. Kali ini, Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dan dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk masa jabatan 2019 hingga 2024.

Pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas di masa kepemimpinannya yang pertama. Pembangunan yang dilakukan secara merata hingga ke daerah terluar Indonesia

ini dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam sektor ini dibandingkan negara-negara lain.

Program prioritas tersebut dibarengi dengan program berupa bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, sejak awal masa jabatannya, Joko Widodo juga mengupayakan reforma agraria dengan salah satunya melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk mengurangi terjadinya sengketa lahan oleh karena ketiadaan sertifikat.

Di masa jabatannya yang kedua, Joko Widodo mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Adapun program pembangunan infrastruktur masih terus dilanjutkan bersamaan dengan itu.

Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kabinet ini terdiri atas 4 menteri koordinator dan 30 menteri bidang yang diumumkan pada 23 Oktober 2019 dan dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Pada 23 Desember 2020, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pergantian sejumlah menteri dengan memperkenalkan enam figur baru dalam kabinet berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2020 tentang Pengisian dan Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Selanjutnya, pada 28 April 2021, Presiden Joko Widodo melantik dua menteri kabinet berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Melalui perubahan terbaru ini, Kepala Negara sekaligus memperkenalkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Investasi.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun?

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun.
2. Untuk mengetahui dampaknya kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan observasi dari peneliti sebagai sumber datanya. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku, jurnal dengan tema terkait, situs resmi pemerintah Republik Indonesia, dan media massa terpercaya. Data-data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan sebuah penjelasan deskriptif berlandaskan konsep kinerja pemerintahan presiden Jokowi.

PEMBAHASAN

Kinerja Pemerintahan Presiden Jokowi Selama Tiga Tahun

Sejak pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2014-2019), laporan tahunan telah menjadi tradisi baru dalam menyampaikan berbagai program dan capaian pemerintah secara umum kepada publik.

Laporan ini memberikan kesempatan seluruh pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan perspektif lebih utuh tentang program-program pemerintah -- yang berasal dari visi-misi Presiden. Sehingga menjadi bagian dari rencana pembangunan nasional dan diimplementasikan oleh semua Kementerian dan Lembaga.

Perspektif seperti itu tidak bisa diperoleh dari sumber lain termasuk media massa, yang tentu memiliki keterbatasan akses, ruang, halaman, dan kemungkinan agenda setting-nya sendiri.

Periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, bersama Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin (2019-2024), tradisi laporan tahunan diteruskan. Selain untuk tujuan diseminasi kinerja pemerintah kepada publik juga sebagai sarana evaluasi tahunan yang memberikan perspektif perbandingan tentang apa yang telah

tercapai dan apa yang harus dilakukan pemerintah pada tahun berikutnya.

Laporan tahunan 2020 mulai dengan munculnya *game changer* dunia, Pandemi COVID-19. Indonesia tidak terkecuali harus menghadapinya. Presiden Joko Widodo yang dikenal sebagai pemimpin yang berani mengambil risiko menyerukan agar kita tidak surut menghadapinya. “Kita harus membajak krisis,”. Meski menghadapi kondisi sulit, kita meyakini kita akan berhasil melewatinya.

Pandemi ini turut mempengaruhi berbagai rencana dan program. Kami beranggapan berbagai perubahan ini penting disampaikan, sehingga masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih utuh, termasuk tantangan dan capaiannya. Presiden tidak pernah mengabaikan janjinya. Meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, tapi Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang terdiri dari: Pembangunan Sumber Daya Manusia; Pembangunan Infrastruktur; Penyederhanaan Regulasi; Penyederhanaan Birokrasi; dan Transformasi Ekonomi. *Refocusing* dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi - terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi. Namun lima arahan pembangunan tetap menjadi pilar bagi Visi Indonesia 2045 demi memastikan Indonesia menjadi negara maju.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, menjadi faktor yang mempengaruhi berbagai rencana dan program. Efek domino pandemi berupa krisis di segala sektor adalah tantangan yang harus dihadapi. Penjadwalan program terpaksa dilakukan, karena prioritas utama adalah menyelamatkan rakyat dari wabah, sekaligus agar krisis kesehatan tak menjadi krisis kemanusiaan

Justru dalam situasi krisis seperti inilah, Presiden Joko Widodo menyerukan kebangkitan baru. Targetnya bukan hanya lepas dari pandemi, tapi membuat lompatan kemajuan di segala sektor. Mumpung peta global lagi dinamis akibat pandemi di mana negara-negara besar di

dunia mengalami kemunduran. Transformasi dan reformasi dilakukan di tengah segala keterbatasan. Refocusing dan realokasi anggaran diprioritaskan pada penanganan kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi. Terutama upaya menangani penyakit menular, pola hidup sehat warga dan pelayanan kesehatan yang lebih prima bagi masyarakat

Di bidang ekonomi, usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi menjadi prioritas untuk didorong lebih maju, dengan transformasi digital. Juga Kartu Prakerja untuk antisipasi pengangguran baru dan yang terkena PHK. Jangka panjang adalah pelaksanaan UU Cipta Kerja yang didesain untuk mengantisipasi pengangguran yang selalu bertumbuh dengan penciptaan lapangan kerja. Program infrastruktur dan energi tetap berkelanjutan dari periode sebelumnya dengan melihat dampaknya bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa yang terpaksa mundur jadwal, di antaranya pemindahan Ibukota Baru meski tetap dalam agenda. Tapi sebaliknya, proyek-proyek padat karya diperbanyak.

Reformasi birokrasi kian didorong untuk menggenjot proses recovery dan meningkatkan produktivitas. Tak lagi kerja berorientasi proses tapi harus berorientasi hasil. Tugas pemerintah dan birokrasi bukan sekedar membuat dan melaksanakan kebijakan, tapi juga membuat masyarakat menikmati dan merasakan manfaat serta hasilnya. Daft (2006:13) mendefinisikan kinerja adalah kemampuan organisasi untuk mempertahankan tujuannya dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Kemampuan ini merupakan prestasi yang telah diraih oleh para pegawai tersebut secara akumulasi menjadi suatu prestasi kerja. Kemudian prestasi kerja akan menjadi tingkat efektivitas suatu organisasi atau kinerja. Semakin tinggi efektivitas kerjanya maka semakin tinggi kinerjanya.

Dampaknya Kepada Masyarakat

Masa Pemerintahan Presiden Jokowi selama tiga tahun diwarnai dengan peristiwa penting global yang mengiringi

perjalanan ekonomi khususnya sektor industri manufaktur- indonesia. Beberapa peristiwa dimaksud antara lain penurunan harga beberapa komoditas yang berakibat pada adanya tekanan terhadap ekspor Indonesia, pelambatan ekonomi Tiongkok sebagai entitas ekonomi terbesar dunia yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara global, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang menciptakan kembali *high cost economy* dan mengganggu sisi *supply*, serta tentunya pandemi Covid-19 yang memberikan tekanan hebat –utamanya kepada sektor industri- baik dari sisi *supply* dan maupun sisi *demand*. Dengan latar belakang kondisi global yang penuh dengan gejolak dan ketidakpastian tersebut, perjuangan bangsa Indonesia dalam membangun sektor industri manufaktur yang berdaulat, mandiri, berdaya saing, dan inklusif menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pandemi Covid-19 menjadi momentum transformasi fundamental agar ketangguhan ekonomi Indonesia dapat terbentuk. Oleh karena itu, momentum ini dimanfaatkan untuk meningkatkan diri dan melakukan transformasi ekonomi secara besar-besaran.

Hasil survei Indopol mencatat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi meningkat dari 60,08 persen menjadi 72,93 persen sementara yang kurang puas dan sangat tidak puas hanya 24,23 persen. Dari hasil tersebut, terekam kepuasan publik atas kinerja Jokowi meningkat 12,85 persen dibandingkan November 2021. Pada November 2021 tingkat kepuasan publik berdasarkan survei ini terekam 60,08 persen sedangkan pada Januari 2022 kepuasan publik meningkat menjadi 72,93 persen. Kalau kita lihat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin ternyata ada tren peningkatan dari survei sebelumnya yang dilakukan tahun 2021. Sementara ketidakpuasan publik atas kinerja Jokowi menurun 16,2 persen dibanding November 2021. Survei pada November 2021 ketidakpuasan publik mencapai 40,43 persen sedangkan pada Januari 2022 menjadi 24,2 persen. Dari angka 60,08 persen naik hingga angkanya menjadi 72,93

persen, trennya naik tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. Survei ini digelar pada 18-25 Januari 2022 dengan melibatkan 1.230 responden yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Metode yang digunakan dalam survei dilakukan dengan cara multistage random sampling, dimana jumlah responden tiap provinsi Indonesia diambil secara proposional berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2020.

Berikutnya hasil Survei Saiful Mujani Research and Consulting, Charta Politik dan Indikator Politik Indonesia menyatakan Penilaian masyarakat terhadap kinerja Presiden terus menurun meskipun angka kepuasan masyarakat masih di atas 50 persen mereka menilai tren penurunan sejak awal tahun 2022.

Data Charta Politika menyebutkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Jokowi turun dari 71,7 persen pada Januari 2022 menjadi 65,3 persen pada Februari menjadi 62,9 penurunan akibat permasalahan ekonomi dan mahalannya harga bahan pokok seperti minyak goreng dan kenaikan BBM (Pertamax) mulai 1 April 2022. BBM Non Subsidi Gasoline RON 92 (**Pertamax**) disesuaikan harganya menjadi Rp 12.500 per liter (untuk daerah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor /PBBKB 5%).

Kemudian masyarakat mencapai 68,5 persen setuju Jokowi melakukan reshuffle kabinet dan 18,2 persen yang tidak setuju. Kebutuhan reshuffle kabinet sangat mendesak terutama pada kementerian terkait harga kebutuhan pokok dan energi. Hasil survei menunjukkan harga bahan pokok menduduki nomor urut satu dengan 47,6 persen sebagai masalah mendesak yang perlu diselesaikan.

KESIMPULAN

Permasalahan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi selama tiga tahun telah melahirkan berbagai kontroversi. Kerangka mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Akibat pandemi covid-19 mendorong transformasi ekonomi digital yang menganjurkan masyarakat

Indonesia berpikir memanfaatkan media sosial sebagai sarana personal branding baik orang dan produk penjualan dan juga terjadi perubahan gaya hidup dibidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian terjadi lonjakan kenaikan harga minyak goreng dan BBM pertamax Sehingga menyebabkan kinerja presiden menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- R.Agoes Kamaroellah, 2014, *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Penerbit Buku Pustaka Radja, Surabaya
- Kementerian Perindustrian, 2021. *Refleksi Tujub Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo Dalam Pembangunan Industri Manufaktur*
<https://kemenperin.go.id/artikel/22893/Refleksi-Tujuh-Tahun-Pemerintahan-Presiden-Joko-Widodo-Dalam-Pembangunan-Industri-Manufaktur>, Diakses 20 Maret 2022
- Osman Nur Chaidir. 2021. Jokowi dan Komunikasi : Sebuah Refleksi Kepemimpinan Periode Kedua Sang Presiden, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(11). DOI:10.36418/jist.v2i11.282, Diakses 25 Maret 2022
- Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. 2021. Presiden Jokowi: Pandemi Jadi Momentum Transformasi Fundamental Ekonomi.
<https://www.baliprov.go.id/web/presiden-jokowi-pandemi-jadi-momentum-transformasi-fundamental-ekonomi/>, Diakses 30 Maret 2022
- Presiden Republik Indonesia. 2021. Arsip Capaian Tahunan Pemerintah, 2021.
<https://capaiankinerja.presidenri.go.id/arsip>, Diakses 30 Maret 2022.
- Ade Mulyana. 2022. Kepuasan Kinerja Jokowi Meningkat, Tapi...,
<https://akurat.co/kepuasan-kinerja-jokowi-meningkat-tapi>, Diakses 30 Maret 2022.